



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

I. DATA PRIBADI

- Nama : MESRARIANITA
- Jabatan : LURAH
- NHK : 223973

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	940.400.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
2. Tanah Seluas 367 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 440.400.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	331.000.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000		
3. MOTOR, --- --- Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000		
4. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	156.200.000
D. SURAT BERTAHAGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	50.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.427.650.000
III. HUTANG	Rp.	240.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.187.650.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

I. DATA PRIBADI

- Nama : **UNTUNG PURWANTO**
- Jabatan : **SEKRETARIS KELURAHAN**
- NHK : **213907**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **1.880.000.000**

- Tanah dan Bangunan Seluas 93 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **141.400.000**

- MOBIL, TOYOTA AVANZA 1,3 G MT MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
- MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 3.200.000
- MOTOR, YAMAHA 2022 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 14.200.000
- MOTOR, YAMAHA 2022 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **14.350.000****D. SURAT BERHARGA** Rp. **----****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **217.000.000****F. HARTA LAINNYA** Rp. **----****Sub Total** Rp. **2.252.750.000****III. HUTANG** Rp. **241.000.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **2.011.750.000**

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

I. DATA PRIBADI

- Nama : MURSILA, S.SOS
- Jabatan : KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
- NHK : 462557

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.060.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 172 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 474 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , WARISAN Rp. 1.000.000.000
- Tanah Seluas 60 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 200.000.000

- MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
- MOTOR, HONDA N MAX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 130.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 3.400.000.000

III. HUTANG Rp. 20.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 3.380.000.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDI EKA PRASETIA**
2. Jabatan : **BENDAHARA**
3. NHK : **756720**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.100.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/135 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 66.400.000

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA XV Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 407 VEGA R 110 CC Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000
3. MOTOR, YAMAHA FREEGO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 129.278

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.166.529.278

III. HUTANG Rp. 590.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 576.529.278

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.